



Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Prihma Sinta Utami ✉

<i>Informasi artikel</i>	<i>ABSTRAK</i>
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2019 Revisi Juni 2019 Dipublikasikan Juli 2019</p> <hr/> <p><i>Keywords:</i> <i>The value of</i> <i>Kemuhammadiyah</i> <i>Nationality Insights</i> <i>Pancasila State</i> <i>Darul Ahdi Wa</i> <i>Syahadah</i></p> <hr/> <p><i>How to Cite :</i> Prihma Sinta Utami. (2019). Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. <i>Jurnal</i> <i>Pancasila dan</i> <i>Kewarganegaraan</i>, 4(2), pp. 62-70. DOI:10.24269/jpk.v4.n2. 2019.pp62-70</p> <hr/> <p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo ✉</p> <hr/> <p>✉ E-mail: prihmasinta@gmail.com ✉</p>	<p>Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) pemahaman mahasiswa tentang konsep negara sebagai <i>darul ahdi wa syahadah</i>; 2) urgensi internalisasi nilai kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan pada mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan <i>study fenomenologi</i>. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa beserta dosen prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) pemahaman mahasiswa tentang konsep negara <i>darul ahdi wa syahadah</i> belum optimal meskipun sudah ada mata kuliah kemuhammadiyah, pancasila dan kewarganegaraan; 2) nilai kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan perlu diperkuat dengan pemahaman konsep negara sebagai <i>darul ahdi wa syahadah</i> sebagai salah satu solusi untuk menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa.</p> <hr/> <p>ABSTRACT</p> <p><i>The Urgency of Internalizing the Value of Kemuhammadiyah Based on Nationality Insights with the State of Pancasila Concept as Darul Ahdi Wa Syahadah. The purpose of this research is to find out about: 1) students' understanding of the concept of the state as darul ahdi wa syahadah; 2) the urgency of internalizing the value of kemuhammadiyah based on national insight to students. The method used in this study is a qualitative method with a phenomenological study approach. Data collection techniques are conducted through interviews and documentation. The primary data source in this study were students and lecturers of PPKn study program at Muhammadiyah Ponorogo University. The results of this study are: 1) students' understanding of the concept of the state darul ahdi wa syahadah is not optimal even though there are courses in kemuhammadiyah, pancasila and citizenship; 2) the value of kemuhammadiyah based on national insight needs to be strengthened by understanding the concept of the state as darul ahdi wa syahadah as a solution to counteract radicalism among students.</i></p>

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia mencatat bahwa Muhammadiyah mempunyai andil dalam salah satu proses perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Ki Bagus mempunyai sumbangsih yang mempengaruhi dalam penentuan dasar negara, bahkan beliau merupakan kunci terakhir dalam lahirnya suatu kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Satu & Muhammadiyah, 2010: 2).

Pada proses perumusan Pancasila terutama pada sila I yang saat ini dikenal dengan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan salah satu usulan Ki Bagus sebagai pengganti tujuh kata pada sila I Pancasila sebelumnya yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Adapun makna dari pemikiran Ki Bagus tersebut bahwasannya Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna tauhid (*tauhidullah*) bagi umat Islam sendiri (Hidayat, 2016: 13).

Meninjau kembali dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia tersebut, terbentuknya negara Indonesia tidak dapat lepas dari adanya Pancasila. Melihat proses perumusan Pancasila sendiri secara jelas terlihat para pendiri bangsa mengatakan bahwa antara agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan namun menjadi dua mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam, namun juga bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia pada dasarnya adalah negara kebangsaan yang menjunjung tinggi antara peran negara dan agama dalam satu konsep kesatuan yang beriringan.

Keberadaan agama dan negara sebagai suatu konsepsi menjadi suatu hal yang masih sering tumpang tindih. Melihat fakta di lapangan saat ini bahwasannya masih banyak dijumpai kasus yang mengatasnamakan agama sebagai indikator pembelaan terhadap negara. Begitu juga berlaku sebaliknya bahwa banyak pelaku-pelaku yang terlibat dalam permasalahan kenegaraan mengatasnamakan agama sebagai alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan dan tujuan politis. Berangkat dari analisis fakta tersebut dapat dikatakan bahwa konsepsi agama dan negara menjadi suatu hal yang menggambarkan suatu simbiosis mutualisme.

Masyarakat Indonesia yang diketahui didominasi oleh masyarakat beragama Islam memberikan pengaruh bagi kemajuan dan pertahanan wawasan kebangsaan. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid di tengah lintasan zaman yang penuh gelora. Seperti dijelaskan dalam keputusan muktamar satu abad Muhammadiyah, pada proses perjalanannya dari abad kesatu dan kedua Muhammadiyah mengedepankan pandangan tentang wawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal sebagai komitmen yang menyatu dalam gerakannya. Konsep masyarakat Islam yang diharapkan oleh Muhammadiyah mempunyai kesamaan dengan karakter masyarakat madani (*civil society*). Pada masyarakat Islam sebagai masyarakat madani selalu menjunjung kemajuan agama dan selalu memihak kepada kepentingan seluruh elemen masyarakat (Satu & Muhammadiyah, 2010: 9-10). Hal tersebut menjadi landasan dasar bahwa Muhammadiyah mampu untuk menjadi salah

jembatan dalam perwujudan pertahanan wawasan kebangsaan Indonesia.

Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara memandang tentang jati diri bangsa dan lingkungannya, esensinya ialah bagaimana bangsa Indonesia mampu memanfaatkan berbagai kondisi yang ada baik dari segi geografis, kondisi sosial, serta sejarah dalam mencapai suatu tujuan nasional (Sunarso, 2006: 165). Wawasan kebangsaan sendiri lahir lantaran adanya proses perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan dengan melalui lika liku dan cerita yang melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Berbagai komponen dalam masyarakat itulah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya terdiri dari satu suku, budaya maupun agama namun terdiri dari berbagai komponen meliputi dari sabang sampai merauke. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian terus menerus untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan pemahaman konsep wawasan kebangsaan.

Pemahaman konsep wawasan kebangsaan perlu ditanamkan pada setiap generasi penerus melalui berbagai media. Pemuda memegang peranan yang penting dalam proses memajukan bangsa melalui berbagai kiprahnya baik dalam bidang organisasi, agama, pendidikan maupun dalam kegiatan sosial masyarakat yang lainnya. Namun pada kenyataannya saat ini pemahaman wawasan kebangsaan belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara umum bahkan bagi para pemimpin negara yang seharusnya menjadi role model bagi rakyat. Terlebih saat ini yang marak terjadi kembali adalah terkait kasus-kasus SARA yang mulai bermunculan kembali.

Selain kasus SARA yang santer diberitakan kembali saat ini adalah terkait kasus korupsi yang terus merajalela di bangsa Indonesia saat ini. Effendy (2013) mengatakan bahwa korupsi terus merajalela, khususnya berada pada pemerintah daerah sebanyak sekitar 296 pemda mempunyai masalah dalam kasus korupsi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas moral dan keimanan seseorang. Apabila seseorang mempunyai keimanan, maka kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir di bangsa ini. Hal inilah yang seharusnya menjadi penguat mengapa perlu nilai-nilai keagamaan yang menyeluruh pada setiap komponen masyarakat,

namun pada kenyataan belum sepenuhnya hal ini dapat terwujud.

Berkenaan dengan hal tersebut Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam mengedepankan nilai-nilai yang diharapkan mampu memperkuat karakter seseorang dan memperkuat nilai-nilai perdamaian. Seperti yang disampaikan oleh Nashir (2012: 45) bahwa Muhammadiyah wajib memelihara sifat-sifat seperti (1) beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah; (3) lapang dada, luas pandangan dengan memegang ajaran Islam; (4) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) mengindahkan segala hukum; (6) amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi teladan; (7) aktif dalam perkembangan masyarakat; (8) kerjasama dengan golongan Islam manapun, (9) bekerjasama dalam membangun negara; (10) bersifat adil.

Selanjutnya Nashir (2012: 123-151) juga membagi nilai-nilai kemuhammadiyah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengintegrasian wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia yang tergambar dari pedoman hidup islami warga Muhammadiyah sebagai berikut: 1) kehidupan pribadi; 2) kehidupan dalam keluarga; 3) kehidupan bermasyarakat; 4) kehidupan mengembangkan profesi; 5) kehidupan dalam berbangsa dan bernegara; 6) kehidupan dalam melestarikan lingkungan; 7) kehidupan mengembangkan IPTEK; 8) kehidupan dalam seni dan budaya. Kembali lagi pada keputusan muktamar satu abad Muhammadiyah yang mengedepankan pemikiran bahwa wawasan kebangsaan serta konsep kemanusiaan universal sebagai suatu komitmen yang terus menyatu dalam gerakannya, hal ini perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Kampus dibawah payung persyarikatan Muhammadiyah dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam kemuhammadiyah dan tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut. Salah satu penekanan dapat dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa dengan berbasis prodi kewarganegaraan. Hal ini dilakukan sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk dapat meneruskan pada generasi kedepannya tentang wawasan kebangsaan yang tidak menghilangkan nilai-nilai keislaman khususnya nilai kemuhammadiyah.

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman mahasiswa dalam mengetahui konsep wawasan kebangsaan dan Muhammadiyah dalam memandang negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*. Hal ini diperkuat karena prodi PPKn berada dibawah naungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernafaskan Islam. Penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif (2017: 216) bahwasannya urgensi penerapan konsep negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* untuk penguatan materi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini didasarkan pada UAD sebagai Universitas dibawah kendali amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai visi dan misi menguatkan nilai Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *study fenomenologis*. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi PPKn. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar jumlah mahasiswa prodi PPKn yang telah mengikuti mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner terbuka dengan menyusun daftar pertanyaan secara sistematis untuk mendapat hasil jawaban secara detail dan mendalam dari informan. Selanjutnya data dokumentasi diperoleh dengan cara mencatat hasil wawancara dari informan, catatan lapangan serta foto terkait.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 tahapan, yaitu: 1) Reduksi Data, dalam tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan data kasar dari lapangan; 2) Penyajian Data, tahap penyajian data hasil wawancara ke dalam bentuk uraian-uraian dilengkapi dokumen pendukung; 3) Penarikan Kesimpulan, merupakan proses akhir untuk memverifikasi hasil penelitian yang telah berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dilihat dalam konteks kebangsaan Muhammadiyah banyak berkiprah dan menorehkan peninggalan yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai pembawa panji pembaruan dan kemajuan. Tokoh sentral pergerakan Indonesia, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno bukan sosok yang asing lagi bagi Muhammadiyah. Tokoh ini tertarik pada Muhammadiyah karena paham kemajuannya tentang Islam (Nashir, 2016:9).

Memperkuat apa yang disampaikan sebelumnya, Mahfud (2013:xi) juga mempertegas bahwasannya bukti sejarah telah mengatakan bahwa pikiran tokoh Muhammadiyah menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi antara keislaman dan ke-Indonesiaan namun justru menuju pada orientasi wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan. Hal ini terwujud dalam prinsip Muhammadiyah terkait memandang negara Pancasila NKRI sebagai *daarul ahdi wa syahadah*. *Daarul ahdi* yang dikatakan bahwa NKRI adalah negara kesepakatan, sedangkan *daarul syahadah* yang berarti sebagai negara kesaksian.

Bertolak pada pernyataan-pernyataan sebelumnya disini penulis memaparkan *research gap* dari hasil kajian sebelumnya terkait diskursus negara Pancasila dari pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Jelas tergambar dari pernyataan sebelumnya bahwasannya Muhammadiyah memandang negara Pancasila sebagai *darul ahdi waa syahadah*. Namun dalam sisi lain, ormas Islam NU memandang bahwa bentuk negara sebagai suatu konsep bersama dalam hidup bernegara. Hal ini dijadikan sebagai pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian dimana diskursus dari bentuk negara ini sebagai salah satu isu yang memicu gerakan radikalisme antara ormas Islam Muhammadiyah dan NU.

Pada kajian keduanya letak perbedaan dalam pemahaman tentang negara Indonesia dari analisis teks bahwasannya Muhammadiyah mengambil rujukan berdasarkan surat Saba' ayat 15 dengan bahasa *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang dipahami suatu hasil konsensus nasional (*dar al*

ahdi) dan tempat pembuktian (*dar al syahadah*). Berbalik makna dari ormas Islam NU bahwasannya memahami bentuk negara berdasarkan rujukan dari surat al Baqarah ayat 30 dengan bahasa (ayat) “khalifah di muka bumi” yang dimaknai sebagai “kehidupan bersama” dalam melaksanakan amanat Allah (Romadlan: 601).

Mengerucut pada kesimpulan penulis terkait diskursus dua pemahaman ormas Islam Muhammadiyah dan NU dalam memandang NKRI keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan negara Indonesia sebenarnya sebagai suatu negara yang tidak dapat lepas dari pengaruh agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pemahaman dan penafsiran antara kedua ormas Islam ini dalam memandang negara Indonesia dapat dimunculkan sebagai isu gerakan radikalisme yang sedang marak di masyarakat. Pada penelitian ini penulis tidak akan mengkaji gap idiologi antara dua ormas Islam ini, namun penulis lebih menguatkan tentang peran Muhammadiyah dalam kiprahnya bagi NKRI. Dimana dari penelitian ini penulis memulai dari konsep Muhammadiyah dalam memandang negara Pancasila sebagai *daarul ahdi wa syahadah* yang dapat dimaknai umat Islam harus berperan aktif terhadap pemahaman, penghayatan dan pengalaman Pancasila dengan nilai ajaran Islam.

Seperti yang dikutip pada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua dalam Satu & Muhammadiyah (2010: 2) yang mengatakan bahwa pada era kolonial Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Selain itu jelas masih teringat dalam catatan sejarah pada awal kemerdekaan Indonesia dimana Muhammadiyah mempunyai peran dalam kunci penentuan dasar negara. Tokoh Muhammadiyah di masa lalu mempunyai sumbangsih pada penentuan dasar negara, terutama Ki Bagus yang merupakan kunci terakhir lahirnya kesepakatan Pancasila sebagai Dasar Negara RI. Seperti yang dikutip dalam Hidayat (2016: 13) yang menyatakan bahwa ketika perumusan Pancasila pada rumusan sila I yang dikenal saat ini yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, frasa “Yang Maha Esa” merupakan usulan dari Ki Bagus sebagai pengganti tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”. Makna yang diusulkan oleh Ki Bagus tersebut bahwa

Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna tauhid (*tauhidullah*) bagi umat Islam.

Diperkuat dari pernyataan Jinan (2015: 271) mengatakan bahwa semenjak lahirnya Muhammadiyah sudah memposisikan diri sebagai suatu gerakan Islam yang bertujuan untuk menyebarluaskan hal-hal ihwal tentang agama Islam di Indonesia. Selanjutnya tokoh pendiri Muhammadiyah sendiri Kyai Dahlan dikategorikan sebagai bagian dari mata rantai gerakan Islam pembaruan di dunia Islam.

Berangkat dari penjelasan di atas Muhammadiyah mempunyai konsep bahwasannya negara Indonesia menjadi negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* yang disahkan pada Mukthamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar. Dijelaskan bahwa makna dari *dar al-ahdi* yang menyatakan bahwa negara pancasila merupakan suatu hasil consensus, sedangkan makna *dar al-syahadah* sebagai suatu tempat pembuktian atau kesaksian. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*).

Berangkat dari uraian diatas jelas terlihat bahwasannya erat kaitannya antara negara dengan agama Islam. Disini juga dapat dilihat bagaimana konsep munculnya negara erat kaitannya juga dengan sejarah Muhammadiyah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa wawasan kebangsaan perlu dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Kaelan (2002: 33-34) sendiri mengatakan bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pandangan ini sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa untuk mencapai cita-cita nasionalnya.

Dari beberapa acuan diatas perlu adanya integrasi antara nilai-nilai Muhammadiyah dengan konsep wawasan kebangsaan yang harus dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn dibawah naungan gerakan muhamadiyah. Berikut pemaparan hasil yang diperoleh dari beberapa komponen nilai muhamadiyah berbasis wawasan kebangsaan yang terjadi di prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Nilai Kemuhammadiyah Pada Kehidupan Pribadi

Nasir (2012: 123-151) menjelaskan bahwa dalam kehidupan pribadi Muhammadiyah harus mampu menjadi pribadi yang mampu menceminkan cara pikir islami yang berorientasi pada prinsip *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Dari hasil yang diperoleh pada wawancara dengan mahasiswa PPKn bahwasannya prinsip ini sudah dilakukan oleh masing-masing mahasiswa, hal ini dilihat dari aktifitas yang dilakukan di kampus sehari-hari. Salah satu aktifitas tersebut tergambar ketika proses sebelum dan sesudah pelaksanaan perkuliahan yang selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa atau membaca alquran bersama.

Dari beberapa wawancara dosen juga menjelaskan bahwa dalam prinsip *hablumminallah* mahasiswa PPKn selalu dikuatkan dengan konsep-konsep nilai muhamadiyah salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan di dalam kelas. Pengimplementasian nilai-nilai ini diterapkan dari dalam bentuk *proses learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace* pada setiap mata kuliah yang diajarkan.

Hal lain yang dijumpai dari hasil wawancara dosen pada prinsip *hablumminallah* yaitu pembiasaan untuk melakukan ibadah tepat pada waktunya. Hal ini sudah menjadi peraturan di universitas dan diturunkan pula ke fakultas serta prodi bahwasannya ketika mendengar adzan maka semua kegiatan perkuliahan atau aktifitas lain ditinggalkan sejenak dan melakukan sholat berjamaah di masjid.

Prinsip *hablumminannas* pada prodi PPKn tergambar pada proses pembelajaran di kelas. Hal ini tergambar dari adanya sikap saling toleransi dan menghargai sesama mahasiswa ketika kegiatan diskusi di kelas. Antar mahasiswa saling menghargai pendapat orang lain ketika proses diskusi ataupun presentasi. Selain itu hal ini juga tergambar dari kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama dengan tim baik dalam kegiatan perkuliahan ataupun dalam kegiatan HMPS PPKn.

Konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* yang kedua juga tergambar dari tindakan untuk menjauhkan diri dari sikap tidak jujur salah satunya yaitu tindakan korupsi dan kolusi. Sebagai warga Muhammadiyah harus mampu menjaga aqidah dengan menjadi pribadi yang selalu menjauhkan diri dari

perbuatan korupsi dan kolusi yang mampu membawa pada kerugian bagi hak publik, Nashir (2012: 123-151).

Hal tersebut juga dipahami oleh mahasiswa PPKn dengan memandang pada dua sudut pandang. Dalam kaca mata Islam dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melanggar ajaran agama islam yang mengambil bukan haknya serta perlu mendapat sanksi yang tegas. Pada pandangan warga negara pelaku korupsi dan kolusi perlu mendapatkan sanksi hukum yang tegas karena hal ini jelas melanggar konstitusi.

Menurut keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar, umat Islam khususnya yang berada pada naungan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan negara Indonesia sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, yaitu menjadi negara yang baik dan berada dalam lindungan Allah. Melihat dari cita-cita Muhamamdiyah tersebut maka memang semestinya mahasiswa dibawah naungan gerakan Muhamamdiyah sebagai generasi penerus bangsa dapat memahami hal tersebut dengan memadukan menjadi insan yang memahami konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

Secara garis besar konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* sudah dilaksanakan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, hanya saja untuk menerapkan konsep ini belum ada strategi atau metode khusus yang dapat dilakukan oleh dosen agar dapat mengintegrasikannya dalam setiap perkuliahan. Maka sangat diperlukan adanya pembaruan melalui metode atau strategi-strategi mengajar dosen agar cita-cita warga Muhamamdiyah menjadikan negara Indonesia *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* dapat terwujud dengan baik melalui mahasiswa prodi PPKn.

Nilai Kemuhammadiyah Pada Kehidupan Keluarga

Nashir (2012: 123-151) mengatakan bahwa dalam konsep kehidupan keluarga pada nilai-nilai muhammadiyah, setiap keluarga muhamamdiyah harus mampu memiliki kepedulian sosial yang ihsan, islah, dan ma'rif dengan lingkungan masyarakat sekitar. Keluarga muhammadiyah harus mampu menciptakan suasana keluarga yang positif sesuai dengan ajaran agama islam.

Kepedulian sosial juga tergambar pada mahasiswa prodi PPKn. Hal ini bertujuan

untuk rasa saling peduli membantu satu sama lain dalam setiap kegiatan urusan perkuliahan. Dalam kegiatan kepedulian sosial di masyarakat terwujud dari adanya tindakan kemasyarakatan salah satunya kegiatan baksos yang bersamaan dengan HMPS PPKn. Selain itu mahasiswa banyak yang terlibat dalam kegiatan penentuan kebijakan permasalahan dalam masyarakat.

Nilai Kemuhammadiyah Pada Kehidupan Bermasyarakat

Konsep hubungan sosial warga muhammadiyah harus mencakup pada beberapa aspek yaitu sebagai individu, keluarga, maupun dalam posisi sebagai jamaah (warga) dan jam'iyah (organisasi), Nashir (2012: 123-151).

Pada prodi PPKn Unmuh Ponorogo mahasiswanya sangat beragam atau dapat dikatakan bersifat multikultural. Hal ini dapat dikatakan demikian karena rata-rata mahasiswa di setiap angkatan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Keadaan demikian rentan dengan adanya banyak perbedaan ragam budaya, bahasa maupun idiologi sehingga rentan pula dengan adanya permasalahan. Namun pada kenyataannya mahasiswa PPKn mampu untuk menjaga adanya keberagaman tersebut dan mampu menghargai serta mampu menyesuaikan diri dengan rekan lainnya.

Nilai Kemuhammadiyah Pada Kehidupan Mengembangkan Profesi

Warga muhammadiyah yang sudah menentukan serta menjalankan profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing selalu ditekankan untuk menjunjung nilai kehalalan dan kebaikan serta amanah dalam menjalankan tugas (Nashir, 2012:123-151). Hal tersebut tergambar dari tindakan nyata untuk menghindari adanya korupsi ataupun kolusi.

Sebagai mahasiswa PPKn yang tidak asing lagi dengan istilah-istilah politik khususnya dengan istilah korupsi, hal ini menjadi prinsip dalam tindakan sehari-hari. Prinsip ini diperkuat dengan adanya mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi pada prodi PPKn Unmuh Ponorogo. Implementasi mata kuliah ini dapat berupa study kasus di lapangan terkait dengan tindakan korupsi dan memberikan hasil solusi dari kasus tersebut.

Realitas tersebut juga sejalan dengan prinsip Muhamamdiyah dengan komitmennya menjadikan negara Pancasila sebagai *Dar al- syahadah*. Sebagai suatu tempat bersaksi dan sebagai tempat untuk

membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagai umat islam atau dalam kajian ini adalah mahasiswa prodi PPKn dibawah naungan gerakan Muhamamdiyah harus siang untuk bersaing (*fastabiqul khairat*). Konsep ini sebagai dasar bahwasannya mereka dibekali dengan konsep kepemimpinan maupun konsep anti korupsi melalui penanaman mata kuliah yang sudah *include* dalam kurikulum wajib prodi PPKn (Muktamar Muhammdiyah, 2015: 13)

Nilai Kemuhammadiyah Pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pada konsep nilai muhamamdiyah berikut, sebagai warga muhammadiyah diharuskan untuk tidak bersikap masa bodoh atau apatis dalam setiap kegiatan berpolitik dengan tujuan perbedaan konsep nilai-nilai islam yang akan disebarakan.

Dari penjelasan tentang penanaman nilai muhamamdiyah berbasis wawasan kebangsaan pada mahasiswa prodi PPKn tersebut dapat diambil benang merah bahwasannya secara garis besar penerapan keduanya sudah tergambar pada kegiatan mahasiswa. Namun secara khusus untuk menyampaikan metode atau strategi pengajaran berbasis dua komponen tersebut belum ada sampai saat ini. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini ada rekontruksi kembali tentang mata kuliah dan penurunan RPS prodi PPKn khususnya.

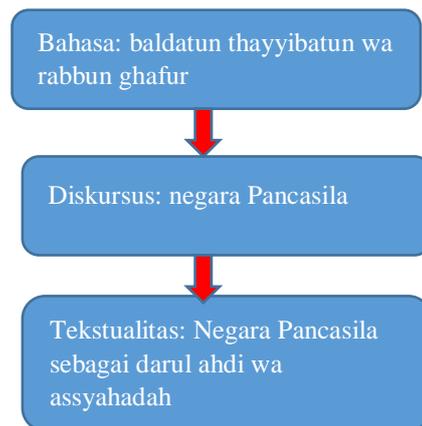
Urgensi Internalisasi Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan Pada Mahasiswa

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwasannya di kalangan mahasiswa prodi PPKn terdiri dari berbagai gerakan ormas Islam. Meskipun berada dalam kampus dibawah naungan Muhamamdiyah namun realitas tentang perbedaan gerakan keislaman ini memang banyak terjadi. Hal lain yang menjadikan masalah adalah paham-paham fanatik terhadap suatu agama atau gerakan. Berangkat dari sini dikhawatirkan akan memunculkan adanya paham-paham radikalisme pada mahasiswa. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan hingga pada realitas ketika berdiskusi menunjukkan adanya *gap* antara mahasiswa yang bergerak dalam ormas Islam Muhammadiyah dan ormas Islam NU. Contoh nyata yang terjadi di lapangan, ada

mahasiswa yang tidak melanjutkan perkuliahan dikarenakan adanya perbedaan idiologi dengan rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai latar belakang ormas Islam yang berbeda.

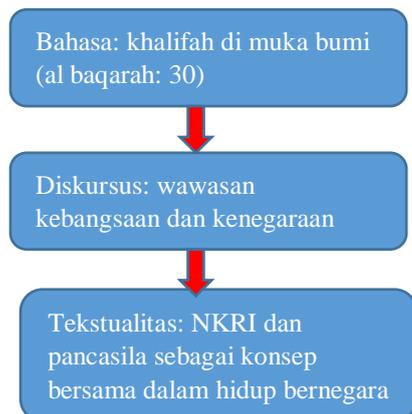
Fakta lain yang dijumpai di lapangan bahwasannya totalitas keterlibatan mahasiswa juga berpengaruh dalam setiap kegiatan seperti organisasi mahasiswa (ORMAWA). Perbedaan atau *gap* antara dua pemahaman tersebut tak jarang menimbulkan pro dan kontra dalam kegiatan ormawa. Ada beberapa kelompok mahasiswa yang condong terlalu fanatik pada salah satu ormas Islam tersebut. Hal ini disinyalir dari beberapa informan juga menimbulkan kendala dalam mencapai kesepatan bersama.

Seperti kajian analisis teori terkait diskursus anantara pemahaman ormas Islam Muhammadiyah dengan NU yang mempunyai pandangan berbeda dalam memandang NKRI ,hal ini menjadi salah satu landasan tentang realitas pada mahasiswa prodi PPKn UnmuH Ponorogo. Dalam analisis teori dapat disimpulkan bahwasannya kedua ormas Islam tersebut meletakkan perbedaan pandangan berangkat dari pemaknaan kata-kata dan sumber pedoman. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadlan (2018: 592-596) Muhammadiyah menggambarkan alur proses distansiasi bentuk negara sebagai berikut:



Gambar 1. Distansiasi Muhammadiyah

Sedangkan proses distansiasi pemahaman tentang bentuk negara oleh NU dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Distansiasi NU

Melihat pada hasil kenyataan di lapangan bahwasannya mahasiswa masih banyak yang berbeda idiologi dalam memandang konsep negara Pancasila berdasarkan perbedaan ormas Islam, dikaitkan dengan teori yang ada bahwa pada dasarnya secara teoritis keduanya mempunyai konsep yang berbeda. Dasar rujukan dan pedoman dalam mengkaitkan konsep negara dan agama Islam pun dalam pandangan dua ormas Islam inipun juga berbeda. Muhammadiyah yang berpedoman dari surat Saba':15 dan NU berpedoman dari surat al Baqarah: 30. Perbedaan yang ada tersebut sayangnya hingga saat ini masih dijadikan sebagai alat hegemoni bagi setiap ormas untuk meperkuat jaringan relasi dalam mencapai kekuasaan.

Bertolak dari dikursus dua ormas Islam diatas, cara penyampaian pemahaman mahasiswa tentang konsep negara sebagai *darul ahdi wa syahadah* juga belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena itu pemahaman mahasiswa terkait dua hal ini juga perlu ditingkatkan salah satunya melalui proses pembelajaran di kelas. Hal ini merupakan suatu hal yang seharusnya benar-benar dilaksanakan di kampus terutama Muhammadiyah untuk menjadi suatu pembiasaan bagi mahasiswa. Paham paham radikalisme yang marak terjadi dewasa ini dapat dicegah pertama kali melalui lingkungan terdekatnya. Kampus disini sebagai salah satu lingkungan terdekat bagi mahasiswa untuk mereka beradaptasi dan melanjutkan fase perjalanna hidup mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berhasilnya pembuatan artikel ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan dukungan finansial dalam pendanaan salah satu artikel yang lolos dalam Hibah Muhammadiyah abad ke-2 tahun 2018 dengan nomor SK: 051/1.3/D/2018. Selain itu ucapan terimakasih juga masih penulis haturkan kepada pihak Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimana artikel ini juga lolos dalam 10 artikel yang lolos dalam peserta penerima travel *grant* seleksi paper Hibah Penelitian Muhammadiyah abad ke-2 di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan tahun 2018 dengan nomor SK: 45/1.3/D/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Didik B., & Aulia, Syifa.S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017
- Effendy, Yuswar. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK Dengan Kasus Korupsi Pada PEMDA Di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen&Bisnis*, Volume 13.No.01 April 2013. ISSN 1693-7619
- Hidayat, Syamsul. (2016). Negara Pancasila sebagai Darul'Ahli wa al-Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI. *Jurnal Tajdida* Vol.14, No.1.
- Jinan, M. (2015). *Muhammadiyah Studies : Transformasi Kajian Tentang Gerakan Islam Di Indonesia*, 269–280.
- Kaelan. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahfud MD, Moh. (2013). *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makasar. (2015). *Negara Pancasila Sebagai*

- Darul Ahdi Wa Syahadah*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. (2012). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah (Ideologi, Khittah, dan Langkah)* Yogyakarta: GRAMASURYA
- Nashir, Haedar. (2016). Muhammadiyah: Gerakan Modernisme Islam. *Jurnal Tajdida* Vol.14, No.1
- Romadlan, Said. (2018). *Diskursus Mengenai Negara Pancasila di Kalangan Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)*. Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah Volume 1. Desember.
- Satu, M., & Muhammadiyah, A. (2010). Pernyataan pikiran muhammadiyah abad kedua.